

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI & KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, berikut adalah penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1

Tinjauan Pustaka

No.	Nama, Judul dan Tahun	Metode Penelitian	Tujuan dan Hasil Penelitian
1.	Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto. <i>Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin. (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan</i>	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian.	Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup RTSM. Penelitian : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Purwoasri yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya

	<i>Purwoasri, Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik</i>		RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita.
2.	Cahyo Sasmito, Ertien Rining Nawangsari. (2019). <i>Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. Journal of Public Sector Innovation</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan menguji dan mengecek data.	Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana proses Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar Penelitian : Hasil penelitian ini, bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terjalin secara baik dengan Pendamping

			<p>PKH, dan Peserta PKH. Dinas Sosial melibatkan Pendamping PKH dalam rapat koordinasi, seminar dan matrikasi sebagai bekal untuk meningkatkan professional dalam implementasi PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan.</p>
3.	<p>Arisman, Parhusip. (2020) <i>Peranan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Sunggal Medan</i>. Journal Of Management, Accounting, Economic and Business</p>	<p>Penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan penelitian kualitatif ini dapat diketahui bagaimanakah pencapaian masalah yang dialami oleh masyarakat kecamatan Sunggal Medan setelah adanya peran serta dari pemerintah berupa program KUBE</p>	<p>Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat melalui E-Warong Kelompok Usaha Bersama (E-Warong KUBE) di Kecamatan Medan Sunggal. Penelitian: Masyarakat lebih terbantu dalam produk, masyarakat</p>

		<p>yang berdagang banyak mengambil hasil olahan para KUBE untuk menjajakan dagangannya di pasar dan di warung-warung sehingga terciptanya usaha-usaha kecil di masyarakat.</p> <p>Program E-Warung KUBE yang diberikan berupa pinjaman sebagai modal usaha kepada masyarakat anggota KUBE telah dapat memberikan peningkatan perekonomian masyarakat yang menjadi pengguna dan anggota dibidang usaha perdagangan. Para Anggota KUBE telah merasakan adanya peningkatan pada pendapatannya sehingga dapat meningkatkan</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>perekonomiannya yang mana usaha usaha perdagangan yang sedang dijalankan ini sangat mendukung untuk memberikan sumber pendapatan yang produktif</p>
4.	<p>Ika Surya Kharismawati, Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPTN) Melalui E-Warong di Kelurahan Sidoresmo Kecamatan Wonocolokota Surabaya. Jurnal Unesa.</p>	<p>Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.</p> <p>Penelitian : maka hasil penelitian terkait dengan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui EWarung di Kelurahan Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang dianalisis</p>

			<p>menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik</p>
5.	<p>Yayuk Wijayanti, Dewangga Nikmatullah, Muhammad Ibnu. (2022). <i>Dampak Pelaksanaan Program E-WarongKelompok Usaha Bersama (Kube) terhadap Tingkat Keberdayaan Ekonomi Anggota di</i></p>	<p>Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.</p>	<p>Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberdayaan anggota E-Warong KUBE selama menjadi anggota E-warong KUBE.</p> <p>Penelitian : Tingkat keberdayaan anggota elektronik warong kelompok usaha bersama di Kota</p>

	<p><i>Kota Metro. Jurnal Pendidikan Tambusa</i></p>	<p>Metro termasuk berada pada tingkat berdaya.hal tersebut terlihat dari peranan Dinas Sosial Kota Metro berpengaruh langsung pada proses monitoring dan pendampingan setiap proses yang dilaksanakan oleh E-warong KUBE, kegiatan pendampingan dilaksanakan saat akan proses penyaluran bantuan sosial hingga evaluasi setelah proses penyaluran selesai.</p>
--	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian ini, penelitian menurut Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto mengenai peningkatan taraf hidup RSTM atau yang biasa disebut Rumah Tangga Miskin melalui Program PKH. Sedangkan ini bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan terhadap masyarakat.

Penelitian menurut Cahyo Sasmito, Eirten Rining Nawangsari mengenai proses Program PKH dalam upaya mengurangi kemiskinan. Sedangkan ini mengenai proses e-Warong yang masih berdiri sampai saat ini.

Penelitian menurut Arisman, Pahursip mengenai bagaimana pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat melalui e-Warong tersebut di Kecamatan

Medan. Sedangkan ini mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah mengenai data yang ada di e-Warong apakah valid mengenai keanggotaan tersebut.

Penelitian menurut Ika Surya Kharismawati, Hj. Weni Rosidiana S.Sos mengenai Implementasi BPNT melalui e-Warong dengan menggunakan Teori Van Metter dan Van Horn dengan enam variable. Sedangkan ini meneliti dengan menggunakan teori pendekatan pemberdayaan Isbandi Rukminto melalui tahapan pelaksanaannya.

Penelitian menurut Yayuk Wijayanti, Dewangga Nikmatullah, Muhammad Ibnu mengenai dampak dari anggota e-Warong tersebut. Sedangkan ini mengetahui tingkat keberdayaan anggota dan keberhasilan anggota tersebut.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Implementasi Program

A. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi sering berubah-ubah dengan banyaknya perkembangan implementasi itu sendiri, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.² Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³

Implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi sebagaimana janji-janji yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output, sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), hal.21

³ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), hal.39

kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implemetasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Implementasi dapat dinyatakan berlaku apabila suatu program sudah dinyatakan jelas dan mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun terhadap akibat/dampak nyata yang ditimbulkan pada masyarakat.

B. Pengertian Program

Program adalah sederetan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok organisasi, lembaga bahkan negara mempunyai suatu program. Program adalah sederetan rencana kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu.⁵ Suatu program juga merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sam atau sasaran-sasarn yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.⁶

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

⁴ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal. 20

⁵ Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009), hal. 129.

⁶ Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 349.

oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program e-Warong ini termasuk kedalam program pemberdayaan yang bertujuan memberdayakan masyarakatnya. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat, apabila sudah memiliki kepercayaan, patuh aturan dan jaringan modal sosial yang kuat maka akan mempermudah mengarahkan dan mengatur masyarakat serta masyarakat juga dapat menerima pengetahuan yang baru dengan lebih baik.

1. Proses dan Tahap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Berikut adalah tahapan pemberdayaan Masyarakat, tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:⁷

- Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
- Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
- Tahap perencanaan kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

⁷ Isabandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas Edisi Revisi*. (Depok: FISIP UI Press, 2005), h.179-186

- Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepada penyandang dana.
- Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.
- Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
- Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

C. Konsep Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1) Pengorganisasian

Struktur organisasi atau pemerintah yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat

berbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2) Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar yang diharapkan dapat tercapai.

3) Penerapan

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.⁸

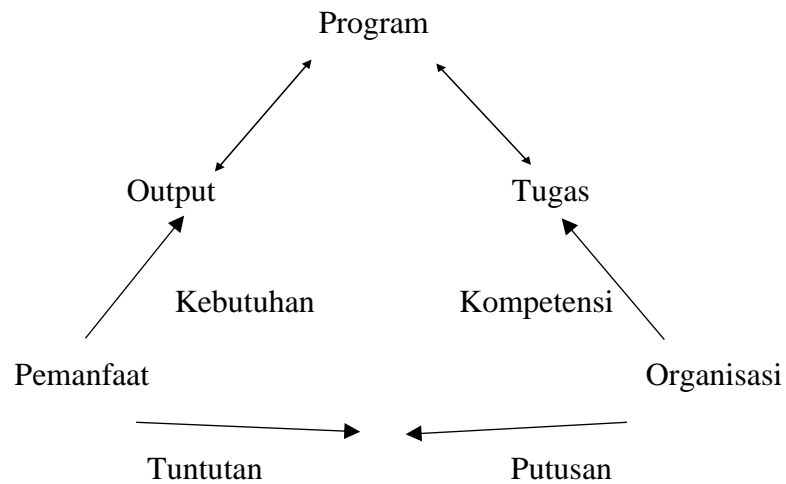
Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Salah satu model implementasi program yang memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model tersebut harus meliputi tiga elemen, Korten menitikberatkan model ini pada tiga elemen kesesuaian yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. **Pertama**, kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. **Kedua**, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. **Ketiga**, kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.⁹

⁸ Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Penerjemah Ricky Istamto. Jakarta: Rajawali.

⁹ Haedar Akib dan Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Prngukuran*. Jurnal Kebijakan Publik. 2008. h.12

Gambar 2.1
Model Implementasi Program



Sumber : David C Korten (2008) dalam Haedar Akib

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan apabila tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan, program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara program yang ditawarkan dengan kebutuhan kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat mendapatkan output program dengan kelompok sasaran program.¹⁰ Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program merupakan mekanisme sebuah program yang terencana untuk mencapai

¹⁰ *Ibid*, h.12

tujuan program dan proses pelaksanaan program, maupun mengatasi hambatan saat pelaksanaan dan juga sesuai dengan perencanaan atau tidak. Berkaitan dengan penelitian implementasinya serta realita yang terobservasi apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Hal ini disebabkan apabila hasil program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas hasil tidak dapat dimanfaatkan atau memberdayakan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan hasil program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2.2.2 Kesejahteraan Keluarga

A. Pengertian Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan keluarga. Persepsi mengenai konsep kesejahteraan tiap-tiap individu yang ada di dunia ini memiliki perbedaannya masing-masing. Pada penduduk miskin kesejahteraan dalam menjalani kehidupan merupakan hal yang selalu mereka sertakan di dalam doa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki modaln kesejahteraan merupakan suatu yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kehidupan yang dijalani terkesan hedonisme. Bagi Sebagian masyarakat gambaran mengenai kesejahteraan dapat diilustrasikan dengan analogi diatas. Namun kesejahteraan bukan hanya sekedar individu yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja, atau bahkan mampu untuk memuaskan keinginannya. Namun disini, kesejahteraan merupakan suatu pandangan yang subjektif yang tidak bisa diukur hanya dari kecukupan materi.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan keluarga merujuk kepada dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan – ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang menidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga. Definisi-definisi tambahan tentang keluarga berikut ini mengkonotasikan tipe-tipe keluarga secara umum yang dikemukakan untuk mempermudah pemahaman terhadap literatur tentang keluarga.¹¹

1. Keluarga inti yaitu keluarga yang menikah, sebagai orang tua, atau pemberian nafkah. Keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak mereka (anak kandung, anak adopsi dan keduanya).
2. Keluarga orientasi yaitu unit keluarga yang didalamnya seseorang dilahirkan.
3. Keluarga besar yaitu keluarga inti dan orang-orang yang berhubungan (oleh darah). Berikut ini yang termasuk “sanak keluarga” yaitu kakek/nenek, tante, paman dan sepupu.

B. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga:

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal:¹²

1. Faktor Internal:

- a. Jumlah Anggota Keluarga. Zaman sekarang tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, dan Pendidikan), tetapi juga kebutuhan lainnya seperti hiburan,

¹¹ Friedman, Marilyn. *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*. (Jakarta : EGC, 1998)h.11

¹² Kuswardinah, Asih. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. (Semarang: FT UNNES, 2007),h.133

- rekreasi, sarana ibadah, sarana transportasi dan lingkungan dan yang serasi. Kebutuhan ini akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sedikit.
- b. Tempat Tinggal. Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang di atur sesuai selera keindahan, bersih, aman akan menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur dan tidak kondusif tidak jarang akan menimbulkan suasana kebosanan, lalu sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram.
 - c. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi dari pada hubungan yang benar benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling menghormati, toleransi bantu membantu dan saling mempercayai. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang di terima maka akan meingkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber keuangan dan pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah dan pekerjaan lain diluar berdagang.

2. Faktor Eksternal

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan agar tidak terjadi kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga karena hal ini dapat mengganggu kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa atau

ketentraman batin anggota keluarga yang datang dari luar lingkungan keluarga diantara lain:

- Faktor Manusia. Iri hati dan fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.
- Faktor Alam. Bahaya alam, kerusakan, dan berbagai virus penyakit.
- Faktor Ekonomi Negara. Pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah dan inflasi.

C. Ruang Lingkup Kesejahteraan Keluarga

Dalam pandangan system, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai output/hasil dari sebuah proses pengelolaan input (sumberdaya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumberdaya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi yaitu material dan spiritual.

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (family wellbeing) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, asset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material (family material well-being) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relative lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara umum pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. Namun terdapat kategori kesejahteraan (quality of life atau individual well-being) yaitu: 1) fisik, 2)

psikologis, 3) tingkat kemandirian, 4) sosial, 5) lingkungan, dan 6) spiritual.

13

Kesejahteraan Ekonomi. Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai asset keluarga, maupun pengeluaran, sementara indicator output memberikan gambaran manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk.

Kesejahteraan Sosial. Beberapa komponen dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan (self esteem) dan dukungan sosial. Penghargaan merupakan pusat pengembangan manusia agar berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil dan optimis. Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai faktor penting bagi kesejahteraan wanita menikah termasuk didalamnya kesejahteraan ibu hamil. Model ketahanan keluarga diliputi orientasi agama, apresiasi (penghargaan, kasih sayang), waktu kebersamaan, komunikasi dua arah, resolusi penanganan krisis, komitmen terhadap anggota keluarga.

Kesejahteraan Psikologi. Kesejahteraan psikologi merupakan fenomena multideimensi yang terdiri dari fungsi emosi dan fungsi kepuasan hidup. Terdapat tiga dimensi kesejahteraan psikologi dalam kaitannya dengan peran orangtua yaitu: 1) suasana hati, 2) tingkat kepuasan, dan 3) arti hidup.¹⁴ Komponen tersebut dapat mengukur kesejahteraan keluarga secara psikologi dalam meneliti biasanya para peneliti sering mengaitkan dengan aspek lain seperti suasana hati, kecemasan, depresi, harga diri dan konsep diri.

¹³ Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah, Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. (Bogor: 2006). h.13

¹⁴ *Ibid*, h.17

2.2.3 Keluarga Penerima Manfaat

A. Pengertian Keluarga Penerima Manfaat

Keluarga Penerima Manfaat adalah bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat, seperti ibu hamil/menyusui, memiliki anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan. Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan bantuan sembako, KIP, KIS, subsidi gas, listrik, atau biasa disebut dengan bantuan komplementaritas. Melalui setiap bantuan yang diberikan tersebut diharapkan dapat membantu dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.¹⁵

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan.¹⁶

Pemerintah berinovasi dengan memberikan program Bantuan yang Bernama Bantuan Pangan Non Tunai untuk para KPM PKH. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk

¹⁵ Andriani, Cici, dkk. 2017. Pemanfaatan Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat Penerima di Kampung Lubuk Sarik, Pesisir Selatan. Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat.

¹⁶ Yunus Muhammad, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan.." Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal. 29-34

membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ E-Warung yang bekerjasama dengan Bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang diberikan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga rumah tangga rawan ekonomi, untuk setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik dengan perantara kartu, yang akan mendapatkan tranferan dana yang digunakan langsung untuk membeli dan ditukarkan dengan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni usaha mikro, usaha kecil, koperasi, pasar tradisional, toko kelontong, e-warung KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Lakun Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya, yang oleh masyarakat biasa disebut dengan e-warung, karena menggunakan mekanisme elektronik dalam transaksinya.¹⁷

Masih banyak yang memanfaatkan dana bantuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta menambah modal usaha. Bantuan PKH telah menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di Kelurahan Pondok Ranji dalam memenuhi kebutuhan, mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, serta menambah modal usaha sehingga dapat membantu menambah perekonomian keluarga.

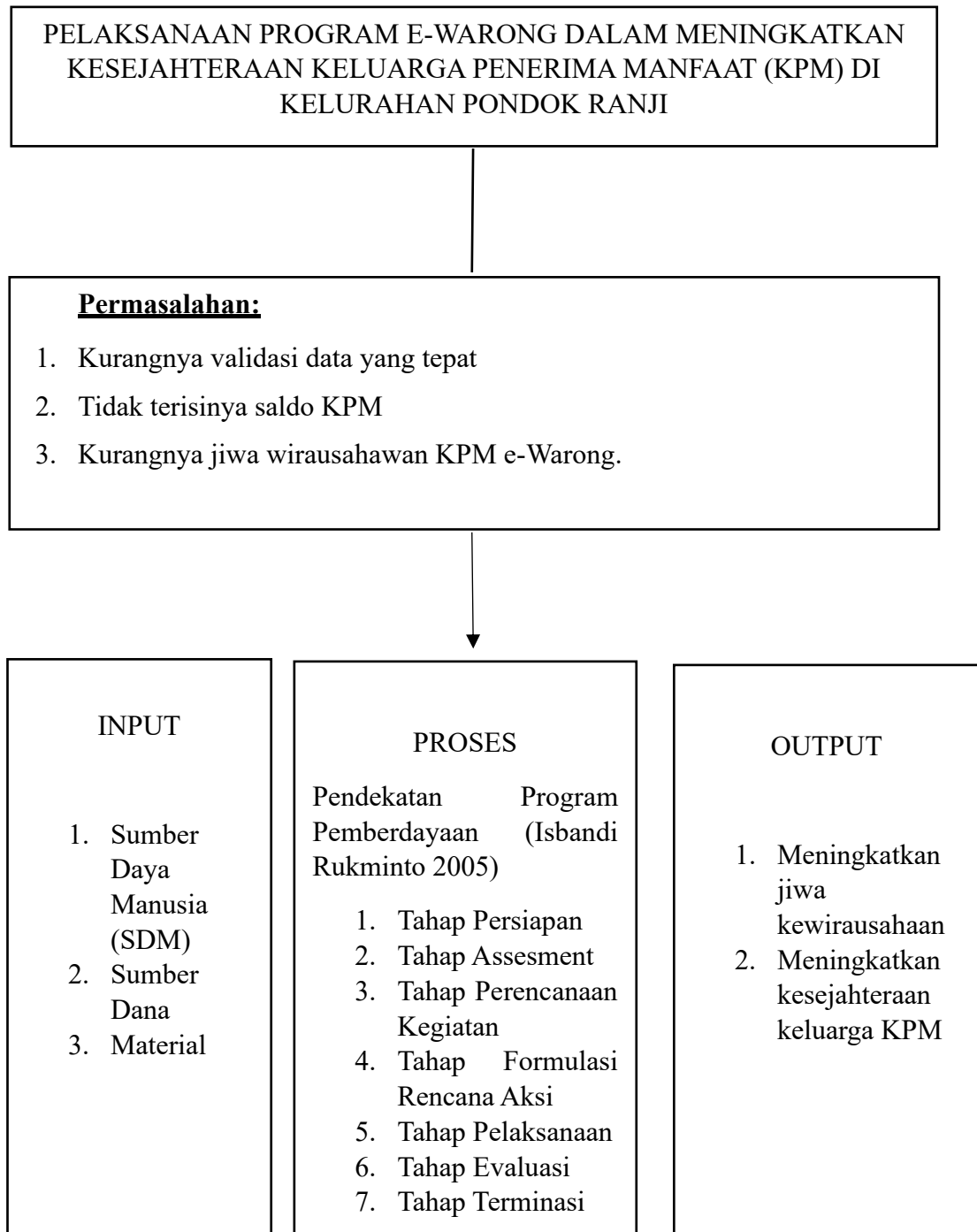
Keluarga Penerima Manfaat harus mendapatkan kesejahteraan keluarganya Kesejahteraan keluarga terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan keluarga. Kesejahteraan menggambarkan kemajuan atau kesuksesan di dalam hidup baik secara materil, mental spiritual, dan sosial secara seimbang, sehingga menimbulkan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga dapat menyongsong kehidupan mendatang dengan gembira dan optimal.

¹⁷ Tim Pengendali BPNT, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (Jakarta: t.p., 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga merujuk kepada dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan – ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang menidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keluarga. Definisi-definisi tambahan tentang keluarga berikut ini mengkonotasikan tipe-tipe keluarga secara umum yang dikemukakan untuk mempermudah pemahaman terhadap literatur tentang keluarga.¹⁸

¹⁸ Friedman, Marilyn. *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*. (Jakarta : EGC, 1998), h.11

2.3 Kerangka Berfikir



Dalam alur tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program e-warong pada KPM ada tiga tahap yang tidak bisa dipisahkan. Pertama

adalah input yang menjelaskan sumber daya, anggaran serta material dari program, yang kedua adalah proses pelaksanaan yang menggunakan tahapan pendekatan pemberdayaan dan ketiga adalah output/hasil dari program tersebut akan menjadikan output untuk para KPM meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Program Pelaksanaan e-Warong ini merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan yang dimana melibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tersebut. Program e-Warong ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi KPM, memudahkan KPM untuk mendapatkan bantuan non tunai, dan meningkatkan kesejahteraan KPM. Dalam proses pelaksanaan program e-Warong ini KPM diajarkan menjadi jiwa wirausahawan, mengajarkan KPM untuk lebih produktif lagi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan KPM di Kelurahan Pondok Ranji.

Kerangka berfikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman di dalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Maksud dari kerangka berpikir di atas yaitu: penelitian ini mengukur penyesuaian implementasi program melalui program e-Warong. Mulai dari bagaimana proses pelaksanaannya hingga sampai menghasilkan tujuan penelitian ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan KPM e-Warong di Kelurahan Pondok Ranji.